

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan wilayah penting yang memiliki nilai strategis dari aspek sosial, ekonomi, dan fisik karena lokasinya berada di Cekungan Bandung, pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Jawa Barat. KBU mencakup wilayah administratif lintas daerah, yaitu sebagian dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2016)

Pertumbuhan populasi perkotaan yang meningkat menyebabkan sebagian warga memilih tinggal di pinggiran kota seperti Kawasan Bandung Utara (KBU). Bersamaan dengan itu, pembangunan di wilayah pinggiran pun bertambah pesat, seringkali tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Pembangunan di lahan kosong atau perubahan fungsi lahan resapan air menjadi bangunan telah berdampak negatif pada lingkungan KBU, mengurangi daya dukung ekologis wilayah tersebut.

Perubahan dari lahan hijau menjadi pemukiman meningkatkan risiko erosi dan sedimentasi di hulu yang memicu banjir di hilir, longsor, dan kekeringan. Kawasan Bandung Utara telah beberapa kali mengalami banjir bandang, termasuk pada 2019 dengan tiga kejadian besar di Cimenyan. Penyebab utama adalah curah hujan tinggi dan alih fungsi lahan resapan yang memengaruhi pemukiman warga di hilir seperti Jatihandap dan Cicaheum. Kebutuhan ruang untuk hunian dan aktivitas sosial ekonomi akibat

bertambahnya populasi juga memicu pembangunan di daerah aliran sungai yang semakin gundul. Kawasan Cimencyan, sebagai daerah resapan dan tangkapan air untuk Cekungan Bandung, berperan penting dalam mencegah banjir, tetapi konversi lahan berisiko memperburuk kondisi tersebut. Alih fungsi dan eksploitasi berlebihan juga berdampak pada penurunan air tanah, mengganggu keseimbangan hidrologis. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, terutama di Bandung Raya, setiap wilayah perlu memelihara kawasan resapan air di daerah tersebut (Wijayakusuma, 2023).

Guna mengatur pemanfaatan kawasan ini, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 yang menggarisbawahi bahwa aktivitas budidaya di KBU harus memperhitungkan daya dukung dan kapasitas lingkungan. Meskipun KBU berperan penting sebagai daerah konservasi dan resapan air untuk mencegah banjir dan menyediakan sumber air bagi wilayah Bandung Raya, alih fungsi lahan tetap berlangsung cepat. Pembangunan yang tidak terkendali telah menyebabkan 70% dari wilayah KBU berubah menjadi area terbangun, yang berdampak pada degradasi lingkungan dan masalah sosial-ekonomi (Sagita, 2016).

Cepatnya pertumbuhan urbanisasi dan pembangunan di KBU meningkatkan risiko perubahan fungsi lahan dari konservasi menjadi permukiman, sehingga memperbesar potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor (Hernawan et al., 2009). Meskipun pemerintah telah menetapkan KBU sebagai kawasan konservasi, implementasi peraturan masih kurang efektif. Contohnya, pengelolaan lahan oleh petani di wilayah ini belum cukup untuk

menekan laju erosi, sehingga diperlukan langkah konservasi yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi agroekosistem (Sutrisna et al., 2010)

Kerusakan lingkungan di KBU juga dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang pesat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Afandi, 2014). Kebijakan tata ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan, terutama di daerah resapan air, masih lemah dan kurang spesifik, yang memicu maraknya konversi lahan menjadi area terbangun (Putri & Purwadio, 2013). Di beberapa wilayah seperti Ciburial, antara 2007 hingga 2015, telah terjadi peningkatan signifikan pada lahan kritis, mengindikasikan semakin tingginya tekanan terhadap ekosistem lokal (Nurrachman et al., 2018).

Masalah alih fungsi lahan semakin dirasakan di berbagai wilayah, termasuk di kawasan perdesaan yang mengalami perubahan ekologi akibat aktivitas manusia dan tekanan pembangunan. Di Kawasan Bandung Utara, degradasi lingkungan menjadi persoalan serius, seperti berkurangnya lahan pertanian, erosi, dan penggundulan hutan. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekologi masyarakat setempat, terutama petani kecil yang bergantung pada kelestarian lingkungan untuk mata pencaharian mereka.

Secara keseluruhan, meskipun KBU diakui sebagai kawasan strategis dan vital bagi lingkungan, lemahnya implementasi regulasi serta tingginya laju pembangunan telah mengancam fungsinya sebagai kawasan konservasi dan resapan air. Meskipun Kecamatan Cimenyan Kawasan Bandung Utara (KBU) adalah area strategis di Jawa Barat yang mencakup empat wilayah administratif, termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB). KBU memiliki peran penting

dalam mengatur tata air di Cekungan Bandung, terutama bagi daerah-daerah di sekitarnya. Namun, pengelolaan KBU di KBB masih dinilai belum optimal. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara dengan Bappelitbangda KBB, ditemukan beberapa isu utama dalam pengelolaan kawasan ini, khususnya terkait lingkungan, perizinan, dan koordinasi kelembagaan multisektoral (Hernawan et al., 2009).

Dari aspek perizinan, pembangunan di KBU harus mengikuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kecamatan Cimenyan Kawasan Bandung Utara. Setiap perizinan di kawasan ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi, sebelum pemerintah kabupaten dapat mengeluarkan izin pembangunan. Namun, dua permasalahan utama yang muncul terkait perizinan adalah maraknya pembangunan permukiman yang mengurangi ruang terbuka hijau dan kendala dalam pengendalian bangunan yang sudah terlanjur berdiri.

Untuk mengendalikan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya membatasi pertumbuhan permukiman dan memperketat pengawasan perizinan. Meski demikian, masih ada kendala besar terkait pendanaan dan koordinasi lintas sektor, yang menghambat efektivitas pengelolaan kawasan strategis ini (Samodro et al., 2020).

Menurut (Nilan, 2021) gerakan ekologi saat ini belum berjalan optimal karena kurangnya keselarasan tujuan antara pihak yang menawarkan solusi terhadap masalah lingkungan dan pihak yang diharapkan berperan besar dalam mendukung kesejahteraan serta pemulihan ekologi. Kesadaran lingkungan dari

berbagai aktor menjadi hal yang mendesak untuk mengatasi krisis ini. Sementara itu memandang bahwa masalah alih fungsi lahan akibat tindakan manusia merupakan refleksi dari krisis nilai, agama, dan kemanusiaan. menambahkan bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena pengelolaan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Berbagai metode telah diupayakan untuk mengatasi krisis ini, namun belum ada formula terbaik yang dapat memperbaiki kerusakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan solusi jangka panjang, yaitu melalui pendekatan pendidikan (Herdiansyah dalam Adawiah et al., 2022).

Yayasan Odesa Indonesia muncul berperan sebagai aktor sosial yang berupaya memobilisasi sumber daya gerakan sosial untuk merespon masalah alih fungsi lahan dan kemiskinan di Kawasan Bandung Utara, terutama di perdesaan seperti Cimencyan.

Didirikan secara resmi pada 5 April 2017, Odesa Indonesia berfokus pada penguatan kapasitas warga desa, khususnya keluarga pra-sejahtera, melalui berbagai program pemberdayaan yang mencakup ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Odesa Indonesia awalnya bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat desa, terutama di wilayah Bandung Utara dan sekitarnya. Namun, setelah terjun langsung ke lapangan, para pengurus menyadari bahwa akar permasalahan kemiskinan adalah kerusakan lingkungan. Ketika akses terhadap air bersih terbatas, hal ini berdampak pada kesehatan, menghambat pertanian, dan bahkan menyebabkan anak-anak putus sekolah. Kondisi ini menciptakan

lingkaran kemiskinan yang terus berulang. Oleh karena itu, upaya mengatasi kemiskinan harus dimulai dengan memperbaiki ekologi. Selain memberikan bantuan kebutuhan pokok secara langsung, Odesa Indonesia juga mengambil langkah konkret dalam pemulihan ekologi dengan menyalurkan bibit tanaman kepada para petani. Bibit yang diberikan umumnya berupa pohon buah berkayu yang berfungsi mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kualitas ekosistem. Selain memberikan manfaat ekologis, hasil panen dari pohon ini juga dapat menjadi sumber gizi tambahan serta alternatif produk pertanian yang dapat dijual oleh masyarakat.

Sejak Januari 2017 hingga Maret 2024, Yayasan Odesa Indonesia telah mendistribusikan lebih dari 894.000 bibit tanaman di Kawasan Bandung Utara, mencakup Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, dan Cileunyi.

Khusus di kawasan Hutan Arcamanik, tepatnya di Oray Tapa, Odesa Indonesia aktif bekerja sama dengan kelompok tani Himpunan Orang Tani Niaga (Hotani) yang dipimpin oleh Toha Odin. Program ini melibatkan 143 keluarga petani yang bermukim di sekitar hutan tersebut.

Berdasarkan catatan Odesa Indonesia, sejak 2017 hingga 2021, sebanyak 286.000 bibit kopi telah ditanam di zona sekitar tiga kilometer dari kawasan tersebut. Sementara itu, dalam rentang waktu 2017 hingga 2024, para petani juga menerima 224.000 bibit pohon buah seperti nangka, alpukat, sirsak, durian, matoa, jambu, sukun, jeruk, serta tanaman pangan lainnya seperti kelor, pete, dan jengkol.

Secara umum, pohon-pohon yang ditanam di sekitar hutan tersebut terawat dengan baik. Para petani mengikuti panduan dari Odesa Indonesia dalam menanam secara acak dengan beberapa prinsip utama:

1. Menanam kopi di sela-sela pohon pinus untuk memastikan keteduhan yang optimal.
2. Memanfaatkan lahan dengan kemiringan ekstrem guna mencegah erosi.
3. Memilih area di bagian cekungan yang dekat dengan aliran air untuk menghindari larutan tanah.
4. Memanfaatkan lahan yang berada di sekitar sumber air.

Gerakan ini muncul dari inisiatif para pengurusnya yang sebelumnya terlibat dalam gerakan Civic-Islam dan pendidikan kewargaan, yang kemudian memperluas fokus mereka dengan mendirikan Odesa untuk mewujudkan perbaikan sosial-ekologis di perdesaan pinggiran kota Bandung.

Dalam menjalankan gerakan sosialnya Odesa tidak hanya mengandalkan dana, tetapi juga memberdayakan jaringan sosial, relawan, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Melalui pendekatan berbasis komunitas, Odesa menggerakkan kegiatan seperti penanaman pohon dan penerapan praktik agroekologi yang bertujuan meningkatkan kesadaran petani agar menerapkan pola bertani berkelanjutan. Upaya ini didasarkan pada prinsip bahwa perubahan hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan gotong royong, sesuai dengan nilai-nilai yang diusung yayasan: “Membumi dalam Kebersamaan,” “Memperbaiki Indonesia dari Desa,” dan “Mengubah Keadaan Bersama.”

Strategi Odesa juga menekankan pentingnya pendekatan eksperimental dan pembiasaan untuk mengatasi masalah di tingkat akar rumput. Filosofi “Bisa Karena Biasa” mendorong pengurus dan warga untuk terus melakukan inovasi dan memupuk optimisme dalam menghadapi tantangan. Selain itu, Odesa mendorong literasi digital di kalangan warga dengan program Online-Desa untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan secara lebih luas.

Penelitian mengenai mobilisasi sumber daya telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks gerakan sosial. Misalnya, penelitian oleh (Riyadi & An'amta, 2023) tentang gerakan #SaveMeratus menyoroti bagaimana mobilisasi sumber daya digunakan untuk melindungi Pegunungan Meratus dari eksploitasi lingkungan serta advokasi hak masyarakat adat. Gerakan ini menunjukkan pentingnya dukungan material, jaringan sosial, dan legitimasi moral dalam mencapai tujuan advokasi lingkungan.

Penelitian lain oleh (Rorrong et al., 2024) berfokus pada kampanye cinta lingkungan di Pantai Cybery, Teluk Youtefa, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan. Meskipun berbasis komunitas, gerakan ini terutama menargetkan wisatawan dan pengunjung pantai, tanpa menyentuh persoalan pemberdayaan masyarakat lokal secara mendalam.

(Harahap & Tarigan, 2024) meneliti pelestarian lingkungan di Kota Tangerang menggunakan perspektif struktural-fungsional. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan formal dan perubahan sosial dapat mendukung pelestarian lingkungan di wilayah perkotaan. Namun, pendekatan

yang digunakan lebih menekankan pada struktur formal daripada keterlibatan masyarakat akar rumput.

(Rahman, 2016) menyoroti gerakan sosial di masyarakat peduli lingkungan Awangpone yang berfokus pada pengurangan pencemaran melalui pendekatan kolektif. Studi ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam menjaga lingkungan lokal, tetapi tidak secara spesifik membahas strategi mobilisasi sumber daya berbasis komunitas.

Terakhir, penelitian oleh (Harsasto, 2020) menggali mobilisasi modal sosial dalam gerakan masyarakat Desa Maitan untuk melawan pendirian pabrik semen. Penelitian ini menekankan pentingnya jaringan sosial horisontal dan vertikal dalam menciptakan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat lokal.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada gerakan sosial berskala besar, konflik masyarakat-pemerintah, atau kampanye kesadaran yang bersifat umum. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengungkap dinamika mobilisasi sumber daya di tingkat komunitas lokal, khususnya dalam konteks pemberdayaan petani dan penyelamatan lingkungan di pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji strategi mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh Yayasan Odesa dalam menghadapi masalah sosial dan lingkungan di Kawasan Bandung Utara. Dengan pendekatan berbasis komunitas, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam

memahami bagaimana kolaborasi lokal dapat mendorong perubahan sosial-lingkungan yang berkelanjutan.

Penelitian mengenai “Strategi Gerakan Sosial Odesa dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara” memiliki menyoroti upaya kolektif Yayasan Odesa dalam menghadapi masalah alih fungsi lahan dan sosial yang kian mendesak di kawasan strategis seperti Bandung Utara. Daerah ini tidak hanya memiliki peran vital sebagai kawasan resapan air dan penyangga ekologi, tetapi juga sedang mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan, pembangunan masif, serta penurunan kualitas lingkungan dan mata pencaharian warga setempat. Hal ini memicu ancaman seperti banjir, erosi, dan penurunan ketersediaan air tanah yang berdampak luas pada masyarakat di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan lingkungan dan sosial di Kawasan Bandung Utara serta munculnya Gerakan Sosial Yayasan Odesa maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi gerakan sosial Yayasan Odesa dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara?
2. Bagaimana Yayasan Odesa meningkatkan kesadaran bersama masyarakat Kawasan Bandung Utara untuk mengatasi alih fungsi lahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi gerakan sosial yang diterapkan Yayasan Odesa dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara
2. Mengetahui cara yang dilakukan Yayasan Odesa meningkatkan kesadaran bersama masyarakat Kawasan Bandung Utara untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai strategi gerakan sosial yang berfokus pada isu lingkungan lebih spesifiknya permasalahan alih fungsi lahan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk studi-studi selanjutnya yang ingin menganalisis peran gerakan sosial dalam mengatasi masalah lingkungan, khususnya di kawasan konservasi dan pedesaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi terhadap strategi gerakan sosial diterapkan oleh Yayasan Odesa. Dari temuan penelitian, Odesa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pendekatan yang digunakan dan melakukan perbaikan atau pengembangan strategi untuk hasil yang lebih efektif.

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan atau program yang mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan gerakan sosial dalam mengelola ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.